

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting, baik berkomunikasi dengan individu lain maupun berkomunikasi dengan kelompok atau masyarakat. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Salah satunya adalah komunikasi yang berada di pemerintahan. Komunikasi pemerintah merupakan penyampaian ide, program, dan gagasan yang dirancang oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun bisa sebaliknya dalam keadaan tertentu (Hasan, 2010 : 1-2).

Setiap komunikasi yang dilakukan memiliki teknik tersendiri di dalam penyampaian, termasuk dalam komunikasi pemerintah. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat membutuhkan teknik-teknik tertentu agar masyarakat dapat menerima pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Terutama dalam penanganan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik merupakan salah satu tanggungjawab dari pemerintah yang harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Seperti konflik proyek panas bumi geothermal yang terjadi di Gunung Talang, Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Konflik proyek panas bumi geothermal mendapatkan penolakan dari masyarakat karena adanya kesalahan komunikasi yang disampaikan oleh Asisten I Bupati Kabupaten Solok. Sebagaimana wawancara awal peneliti dengan Bapak Camat Lembang Jaya bahwa kesalahan komunikasi dalam menginformasikan program pembangunan proyek panas bumi geothermal yang dilakukan oleh asisten I Bupati

adalah awal dari pemicu terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap proyek tersebut dimana akhirnya konflik berujung kepada bentrok dan semakin memanas.

Proyek panas bumi geothermal merupakan program pembangunan dari Pemerintah Indonesia yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Proyek yang dikelola oleh PT Hitay Daya Energy yang merupakan perusahaan investor asal Turki, dipercayai oleh Kementerian ESDM untuk melakukan pengeboran terhadap panas bumi yang berlokasi di Gunung Talang, Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Namun, rencana pembangunan proyek geothermal tersebut, menimbulkan pertentangan dari warga yang akan terkena dampak proyek. Masyarakat menolak keras rencana pembangunan proyek geothermal tersebut.

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara di dunia yang menghadapi peningkatan permintaan listrik setiap tahunnya. Dapat dilihat pada <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/energi-panas-bumi/-item268?>, menjelaskan bahwa sebanyak 10%, Indonesia mengalami peningkatan permintaan listrik setiap tahun (terutama di pulau-pulau luar Jawa) dan karena itu Negara Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas untuk menghasilkan listrik sekitar 6 Giga Watt per tahun. Rasio kelistrikan Indonesia yaitu persentase rumah tangga Indonesia yang terhubung dengan jaringan listrik sekitar 80,38% pada akhir 2013, mengimplikasikan bahwa masih ada sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses listrik. Pemerintah Indonesia memiliki harapan tinggi terhadap energi geothermal.

Sekitar 40% cadangan energi geothermal dunia terletak di bawah tanah Indonesia. Negara Indonesia diperkirakan memiliki cadangan-cadangan energi geothermal terbesar di dunia dan memiliki potensi tinggi untuk sumber energi terbarukan. Namun, sebagian besar dari potensi ini

belum digunakan dan saat ini, Indonesia hanya menggunakan 4-5% dari kapasitas geothermalnya.

Berdasarkan data tersebut, PT. Hitay Daya Energy yang merupakan perusahaan investor asal Turki dipercayai oleh Kementerian ESDM untuk melakukan pengeboran terhadap panas bumi yang berlokasi di Gunung Talang Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Energi panas bumi atau energi geothermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami (hujan) dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa terdapat potensi panas bumi sebesar 193 MWe di Kabupaten Solok¹. Namun pembangunan dari proyek ini menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Penolakan demi penolakan dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat merasa terancam dengan adanya proyek ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Camat Kecamatan Lembang Jaya, masyarakat menolak karena takut akan dampak dari pembangunan proyek geothermal ini, seperti terjadinya semburan lumpur di Lapindo, Pulau Jawa. Masyarakat takut apabila dilaksanakan proyek geothermal ini akan memicu munculnya lumpur dari dalam perut bumi, sehingga ketakutan tersebut membuat masyarakat melakukan penolakan terhadap pembangunan proyek panas bumi geothermal tersebut.. Masyarakat menolak karena khawatir akan rusaknya kampung mereka. Seperti yang dilansir dalam berita online Harian Haluan pada tanggal 14 September

¹ "Panas Bumi Gunung Talang Bukit Kili disosialisasikan berpotensi menjadi sumber energi terbarukan : <http://tingkapone.com/baca.php?id=414> (diakses pada tanggal 25 September pukul 08.20 WIB)

2017², menerangkan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan eksplorasi energi panas bumi geothermal sebagai upaya pemenuhan program energi nasional mendapat penolakan dari masyarakat. Ratusan masyarakat Gunung Talang yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pencinta Alam Gunung Talang menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan proyek geothermal yang akan dilaksanakan di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Masyarakat menolak karena takut akan rusaknya kampung mereka akibat kepentingan segelintir orang.

Pembangunan proyek geothermal ini akhirnya tidak mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak terima untuk dibangun proyek geothermal tersebut. Alasan lainnya adalah masyarakat takut akan kerusakan lingkungan yang akan terjadi dengan pembangunan proyek ini. Warga mengkhawatirkan efek samping terhadap lingkungan dan membawa dampak buruk pada sektor pertanian. Seperti dilansir pada berita online Harian Haluan pada tanggal 17 September 2017³, menerangkan bahwa berdasarkan hasil studi potensi resiko, pembangunan proyek panas bumi yang akan dibangun di Gunung Talang, Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hal serupa juga dikatakan oleh direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Uslaini Chaus dalam dialog akademis yang diinisiasi oleh pasca sarjana Universitas Andalas yang bertajuk “Pro-kontra Rencana Pembangunan Geothermal di Gunung Talang Bukit Kili” pada tanggal 16 September 2017.

² Anonymous “Ratusan Warga Talang Tolak Proyek Geothermal” harianHaluan.com : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/66695/ratusan-warga-talang-tolak-proyek-geothermal> (diakses pada tanggal 25 September pukul 08.48 WIB)

³ Anonymous ”Walhi Sumbar: Proyek Geothermal Berpotensi Merusak” harianHaluan.com : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/66739/walhi-sumbarproyek-geothermal-berpotensi-merusak> (diakses pada tanggal 25 September pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan portal berita online Harian Haluan pada tanggal 12 Desember 2017⁴, menerangkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya kesalahpahaman komunikasi. Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin menyatakan bahwa proyek geothermal (energi panas bumi) di kawasan Batu Bajanjang Kabupaten Solok mendapat penolakan karena ada kesalahpahaman tingkat tinggi antara masyarakat dan investor. Beliau juga menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan provinsi untuk sosialisasi terkait manfaat dari proyek geothermal tersebut.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Elafki selaku Kepala Humas Kabupaten Solok, proyek geothermal mendapat penolakan dari masyarakat karena masyarakat tidak mendapat penjelasan yang mendalam mengenai proyek geothermal yang akan dibangun. Pemerintah Kabupaten Solok bersama pihak perusahaan PT. Hitay Daya Energy sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa proyek geothermal yang akan dibangun tidak akan menimbulkan dampak yang buruk kepada masyarakat karena proyek geothermal merupakan proyek terbarukan. Namun dalam sosialisasi yang dilakukan, masyarakat tidak mendapatkan penjelasan penuh mengenai proyek geothermal tersebut, sehingga masyarakat menolak dan takut akan kerusakan lahan pertanian mereka.

Penolakan proyek geothermal ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat dimana memunculkan konflik yang semakin memanas dan berujung pada kisruh. Seperti di lansir pada berita online Harian Haluan pada tanggal 20 November 2017⁵, menerangkan bahwa tiga orang karyawan dari perusahaan PT. Hitay Daya Energi yang akan mengeksplorasi kawasan disandera

⁴ Anonymous "Ada Kesalahpahaman Terkait Proyek Geothermal" harianHaluan.com : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/67943/ada-kesalahpahaman-terkait-proyek-geothermal> (diakses pada tanggal 25 September pukul 13.20 WIB)

⁵ Anonymous "Kisruh Proyek Panas Bumi di Kabupaten Solok, Satu Unit Mobil Dirusak Warga" harianHaluan.com : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/67646/kisruh-proyek-panas-bumi-di-kabupaten-solok-unit-mobil-dirusak-warga> (diakses pada tanggal 25 September pukul 14.35 WIB)

oleh warga. Bahkan mobil yang dibawa oleh karyawan tersebut dirusak oleh masyarakat. Masyarakat geram karena masalah eksplorasi panas bumi tersebut tidak kunjung selesai.

Berdasarkan portal berita online Harian Haluan pada tanggal 21 Maret 2018⁶, menerangkan bahwa unjuk rasa kembali dilakukan oleh masyarakat Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya dimana konflik ini mengakibatkan polisi dan warga luka-luka. Masyarakat melempari pihak kepolisian yang ikut dalam menemani tim survey dari karyawan PT Hitay Daya Energi. Tiga personel kepolisian yaitu Bripda Iksanul Fajri, Briptu Aswandi Priatama dan Brigadir Yudi Eka Mulia mengalami luka-luka. Sementara dari pihak warga ada tujuh orang yang mengalami luka-luka yaitu tiga orang perempuan, dua orang laki-laki dan dua anak-anak.

Perlu adanya pihak yang berkompeten untuk menangani konflik yang sedang terjadi di masyarakat terkait rencana pembangunan proyek geothermal tersebut. Pemerintah Kabupaten Solok selaku institusi yang berkuasa memiliki tanggung jawab di dalam menyelesaikan konflik pertambangan geothermal ini. Pemerintah berperan dan mengambil sikap dalam menanggulangi konflik ini karena tugas pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi setiap warganya. Untuk itu, pemerintah membutuhkan teknik-teknik komunikasi tertentu untuk mengelola konflik ini dengan baik. Teknik komunikasi dalam mengatasi konflik menjadi suatu hal yang penting adanya karena dapat menentukan keberhasilan dari upaya penyelesaian konflik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik proyek geothermal yang terjadi di Nagari Gunung Talang, Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah selaku institusi yang berkuasa dan memiliki tanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan kepada warganya. Pemerintah

⁶ Yutiswandi "Proyek Geothermal di Solok Berujung Bentrok, Polisi dan Warga Luka-luka" harianHaluan.com : <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/69208/proyek-geothermal-di-solok-berujung-bentrok-polisi-dan-warga-lukaluka> (diakses pada tanggal 25 September pukul 16.15 WIB)

mempunyai teknik-teknik komunikasi untuk dilakukan dalam penanganan konflik tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah penggunaan teknik komunikasi dalam upaya penanggulangan konflik pembangunan proyek panas bumi geothermal Solok pada Pemerintah Kabupaten Solok?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui awal penyebab terjadinya konflik pembangunan proyek panas bumi geothermal di Kabupaten Solok
2. Mengetahui penggunaan teknik komunikasi dalam upaya penanggulangan konflik pembangunan proyek panas bumi geothermal Solok pada Pemerintah Kabupaten Solok
3. Mengetahui bentuk/model komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam upaya penanggulangan konflik pembangunan proyek panas bumi geothermal Solok

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, terutama berkaitan dengan Teknik Komunikasi Kepemerintahan
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Solok dan PT. Hitay Daya Energy dalam menganalisis konflik perusahaan/instansi pemerintahan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan penambah wawasan dan sumbangan kepastakaan dan acuan bagi penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

